PENINGKATAN KWALITAS PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN MELALUI PEMBINAAN PROFESIONAL GURU

Oleh : YOTO

Abstrak

Program dan sasaran yang ingin dicapai pendidikan kejuruan selain melipat gandakan daya tampung, penyediaan tenaga kerja melalui jalur formal dengan mutu kemampuan yang makin mendekati persyaratan layak kerja, juga peningkatan mutu dan relevansi lulusan sesuai dengan laju pembangunan serta pengembangan program pendidikan kejuruan.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan kejuruan dilaksanakan perubahan kurikulum sekolah kejuruan secara bertahap dan terus menerus yang disertai dengan pembinaan profesional guru. Pembinaan guru merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari semua usaha pembaharuan mutu pendidikan kejuruan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan profesional guru adalah meningkatkan mutu dalam kegiatan belajar mengajar sehingga mampu meningkatkan kwalitas lulusan sebagaimana yang diharapkan dalam kurikulum sekolah kejuruan dan kebutuhan masyarakat.

Pembinaan profesional guru dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah, pengawas, pemantapan kerja guru, penataran / kursus, seminar-seminar dan melanjutkan studi yang lebih tinggi atau tugas belajar.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kwalitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun aspek rohaniah. Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional (Undang - Undang RI No. 2, 1989 : 50).

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional secara menye-

Drs. Yoto adalah dosen jurusan PTM FPTK IKIP Malang

luruh, maka disusunlah berbagai jenis sekolah sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuan serta tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461 / U / 1983 tentang perbaikan kurikulum di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka secara bertahap dan terus menerus dilakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum kejuruan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan kejuruan. Pembaharuan Kurikulum sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan akan kurang efektif apabila tidak disertai pembinaan kemampuan profesional guru.

Kegiatan pembinaan guru merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari semua usaha pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, tanpa pembinaan, hasil penataran yang dilakukan secara besar-besaran di tingkat nasional maupun di daerah-daerah sering lenyap, kurang mempunyai dampak yang nyata dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas.

Kurikulum baru untuk Sekolah Kejuruan yaitu kurikulum 1984 menuntut kesiapan guru secara baik dalam rangka menyelenggarakan proses belajar mengajar di kelas. Pengajar adalah merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan kualitas lulusan dari suatu sekolah. Sebagai akibatnya apabila para guru sekolah kejuruan tidak dipersiapkan secara mantap, baik segi pengetahuan dan ketrampilannya, maka akan membawa dampak turunnya kualitas lulusan sekolah kejuruan dengan kata lain lulusan sekolah kejuruan tidak siap pakai. Hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan sekolah kejuruan, yaitu mendidik tenaga-tenaga terampil tingkat menengah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam upaya meningkatkan kwalitas pendidikan kejuruan sangat diperlukan adanya pembinaan profesi para pengajarnya, dengan tujuan : 1) meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar, 2) agar hal-hal yang diperoleh guru dalam berbagai penataran dapat diterapkan di kelas, 3) Agar persoalan yang dihadapi guru di lapangan dapat terpecahkan, 4) Agar guru mampu dan mau meningkatkan kemampuan profesionalnya, 5) agar hubungan antara masyarakat dan sekolah terbina dengan baik dan yang lebih penting lagi adalah 6) meningkatkan kwalitas lulusan sekolah kejuruan.

Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan.

Pendidikan adalah semua tindakan yang diatur dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pendidikan

Menengah kejuruan yang diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan masyarakat, harus mampu memecahkan persoalan yang bersifat praktis dalam upaya mengembangkan ketrampilan dan pengetahuannya.

Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu dan profesional yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu (Undang - Undang Republik Indonesia, No. 2 Th. 1989, pasal 11). Oleh karena pendidikan kejuruan dan keahlian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional khususnya dalam upaya menyiapkan tenaga terampil tingkat menengah dan pelaksana sesuai dengan tuntutan pembangunan, maka pendidikan kejuruan harus mendapatkan perhatian yang serius dan peran serta semua pihak yang terkait (Sutopo. N.A, 1989).

1. Pendidikan Kejuruan di Negara Industri.

Pada Umumnya negara-negara industri memiliki sistem pendidikan kejuruan (khususnya teknik) yang hampir serupa. Negara - negara industri seperti Jerman, Belanda, Italia dan Perancis mempunyai sekolah-sekolah kejuruan teknik yang menonjol perannya. Untuk melihat peran sekolah kejuruan teknik ini sebagai bandingan bisa dilihat pada negara Jerman Barat yang tidak dapat disangkal lagi bahwa industrinya maju pesat dan telah diakui oleh dunia Internasional.

Produksinya dengan mutu yang tinggi dapat dilihat di negara- negara hampir seluruh dunia.

Mercedes Bens, BMW, Volkswagon, Dentz, dll merupakan merk-merk mesin dan mobil yang dikenal bermutu tinggi.

Sebagai negara Industri Jerman Barat memiliki suatu motto bahwa asetnya yang termahal dan terpenting adalah tenaga kerja yang berkemampuan tinggi. Tenaga kerja semacam ini sebagian besar dihasilkan oleh Sekolah Kejuruan teknik yang mampu memberikan ketrampilan (siap pakai) untuk memasuki dunia industri (Moedjiarto, 1991 : 4).

Bagi Indonesia, apabila mengharapkan seperti apa yang telah dicapai oleh negara industri maju maka seharusnyalah mengambil pengalaman dari negara industri tersebut dalam mempersiapkan kader-kader industri dan dalam mempersiapkan penyelenggaraan pendidikan kejuruannya.

Di Jerman Barat, jumlah siswa yang mengambil jalur pendidikan kejuruan bila dibanding dengan siswa yang mengambil jalur sekolah umum porsinya adalah 5 (lima) untuk sekolah kejuruan berbanding 3 (tiga) untuk sekolah Umum. Lulusan sekolah kejuruan disiapkan untuk segera terjun ke dunia kerja, meskipun bagi mereka yang berminat masih memungkinkan untuk melanjutkan ke Pendidikan Politeknik yang lebih tinggi. Bagi Sekolah umum lulusannya memang dipersiapkan untuk melanjutkan ke Perguruan tinggi.

2. Sekolah Kejuruan (teknik) di Indonesia.

Apa yang terjadi di Indonesia ternyata justru jauh berbeda dengan yang terdapat pada negara-negara industri. Kita bisa melihat, bahwa sebagian besar tenaga yang bekerja dibidang industri justru tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan sekolah kejuruan. Baik yang operator mesin, tukang las, tukang bubut, tukang arloji dll. Sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan sekolah umum (SMP /SMA). Hal ini dapat dilihat di perusahaan - diperusahaan / industri, bahkan sebagian perusahan / industri mempekerjakan wanita dengan latar pendidikan yang kurang memadai serta mempekerjakan anak-anak usia sekolah untuk menekan upah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Mudjiarto, 1991).

Bilamana jumlah sekolah menengah atas (Umum) dibandingkan dengan jumlah sekolah kejuruan di negara industri seperti Jerman Barat adalah 3 : 5, justru sebaliknya di Indonesia jumlah sekolah umum jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah sekolah kejuruan, bahkan minat ke sekolah kejuruan makin tahun makin berkurang. Hal ini terbukti dengan banyaknya sekolah-sekolah kejuruan diberbagai daerah diganti dengan sekolah lanjutan umum (SMP / SMA), dengan kata lain sekolah menengah kejuruan (ST / STM, SMKK, SMEA, dll) banyak yang dihapuskan atau ditutup.

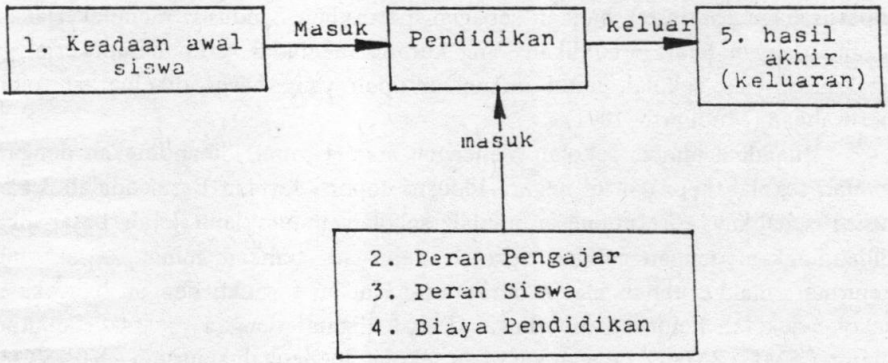
Pemerintah sudah berusaha untuk menggalakkan minat calon siswa untuk memasuki sekolah kejuruan, namun hasilnya belum memuaskan. Diantara usaha penjaringan siswa untuk memasuki sekolah kejuruan adalah upaya mempopulerkan sekolah kejuruan melalui setiap kesempatan, setiap pertemuan, melalui media masa dan sarana apa saja yang masih memungkinkan. Fakta yang tidak dapat dibantah adalah membengkaknya jumlah penganggur dari tahun ke tahun justru yang terbanyak adalah lulusan SLTA umum. Mengingat jalur SLTA umum seharusnya ke Perguruan Tinggi kenyataan ini dapat dikatakan merupakan penyimpangan dari tujuan semua dan merupakan gejala yang harusnya segera diatasi (Moedjiarto, 1991 :7).

Dari pembahasan di atas kiranya perlu dalam upaya menjaring dan meningkatkan minat siswa masuk sekolah kejuruan pemerintah atau pihak-pihak yang terkait mengambil langkah yang lebih mantap dengan maksud memberikan rangsangan kepada masyarakat / calon siswa untuk masuk sekolah kejuruan. Suatu contoh : memberikan atau mencarikan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah kejuruan. Untuk ini perlu adanya kerja sama yang baik antara Lembaga Pendidikan kejuruan dengan industri / perusahaan. Atau alternatif lain dengan memberikan berbagai beasiswa bagi siswa sekolah kejuruan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka pengembangan pendidikan dan perbaikan pendidikan kejuruan harus diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan daya guru atau efisiensinya.

Daya guna suatu sistem pendidikan dapat didefinisikan dengan lima parameter (lihat gambar).

Gambar : DAYA GUNA SUATU SISTEM PENDIDIKAN



Dari gambar di atas dapat dirumuskan daya guna atau efisiensi suatu sistem pendidikan sebagai berikut :

$$\text{Daya guna (efisiensi)} = \frac{\text{Hasil}}{\text{Biaya}} = \frac{5-1}{2+3+4}$$

Kalau kita perhatikan dari bagan daya guna suatu sistem pendidikan, maka yang menentukan tinggi - rendahnya daya guna sistem pendidikan adalah : keadaan awal siswa, peran guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, peran siswa dalam mengikuti pelajaran dan biaya pendidikan yang diperlukan.

Oleh karena didalam proses berlangsungnya pendidikan guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan, maka pembinaan profesional terhadap mereka adalah benar-benar merupakan persyaratan mutlak yang harus dilakukan oleh guru.

Program Pembinaan Guru Sekolah Kejuruan

1. Pengertian Pembinaan Guru.

Pengertian pembinaan guru pada umumnya adalah merupakan rangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru, terutama bantuan berwujud pelayanan / bimbingan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan bimbingan Profesional adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar (Juklak kurikulum Dikmenjur IV, 1985 :4). Jadi jelasnya rangkaian usaha pelayanan / bimbingan profesional akan memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar mengajar.

2. Prinsip dan Ciri Pembinaan.

Pembinaan yang menekankan pelayanan profesional hendaklah didasarkan pada beberapa prinsip sesuai petunjuk pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah kejuruan buku IV (1985). Adapun prinsip pembinaan profesional diuraikan sebagai berikut :

a. Pembinaan dilakukan sesuai dengan apa yang diperlukan guru, hal ini beranjak dari kebutuhan yang dirasakan oleh guru.
b. Hubungan antara pembina dan guru berdasarkan hubungan kerabat kerja, bukan antara atasan dan bawahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang akrap, komunikatif dan tidak ada rasa "sungkan".
c. Pembinaan ditunjang dengan semangat keteladanan dan terbuka untuk semua guru.
d. Pembinaan dilaksanakan secara terus menerus dan terpadu.
e. Pembinaan dilaksanakan dengan berbagai wadah dan jalur yang ada.
f. Pembinaan dapat diperlancar dengan melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi baik secara horisontal maupun vertikal, pada tingkat pusat maupun daerah.
g. Pembinaan dilaksanakan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

Pelayanan profesional selain menggunakan beberapa prinsip mendasar seperti yang dijelaskan di atas juga ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.
b. Meneliti proses belajar mengajar yang terjadi apa adanya.
c. Menilai proses belajar mengajar berdasarkan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan musyawarah bersama.
d. Meningkatkan proses belajar mengajar melalui dialog profesional yang kreatif.
e. Memberi bantuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar melalui cara yang dimengerti oleh guru.
f. Hubungan dalam pembinaan antara pembina dan guru bersifat demokratis.

3. Program Pembinaan Oleh Kepala Sekolah.

Program pembinaan yang merupakan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan pembinaan guru yaitu peningkatan kemampuan profesionalnya.

Program pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru adalah pembinaan dalam hal : pemahaman kurikulum, penyusunan persiapan mengajar, penguasaan bahan pengajaran, kemampuan memilih dan menggunakan metode mengajar, mengenal dan mengetahui perbedaan latar belakang murid, penilaian termasuk pemanfaatan umpan balik penilaian proses dan hasil belajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan pembinaan dalam hal penentuan usaha tindak lanjut untuk meningkatkan proses belajar mengajar.

Di samping hal tersebut di atas kepala sekolah diharapkan mempelajari dan menguasai salah satu mata pelajaran sehingga ia dapat berperan sebagai pemandu mata pelajaran.

4. Program Pembinaan oleh Pengawas.

Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dari kantor wilayah Depdikbud propinsi Jawa Timur biasanya dilaksanakan dalam waktu yang tidak ditentukan (diberikan bilamana dipandang perlu). Sebagai ancar-ancar untuk Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) wilayah Jawa Timur pengawas biasanya terjun ke sekolah-sekolah antara (3-4) bulan sekali.

Dalam hal memberikan pembinaan kepada guru, komponen-komponen yang diberikan oleh pengawas kepada guru pada dasarnya sama dengan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru, akan tetapi pengawas harus pula

membuat program-program pembinaan wilayah seperti : 1) kerja sama antar sekolah dalam usaha meningkatkan mutu proses belajar mengajar, 2) kunjungan antar sekolah dalam rangka mempelajari kelebihan-kelebihan masing-masing sekolah untuk dicontoh, 3) mengidentifikasi sekolah-sekolah yang berprestasi untuk dijadikan model dan 4) mengidentifikasi guru-guru yang potensial dan berprestasi untuk dijadikan pemandu bidang studi dan ini dapat dimanfaatkan dalam kelompok kerja guru.

Pembinaan Guru melalui Pemantapan Kerja Guru dan Musyawarah Guru Bidang Studi.

Dalam sistem pembinaan lama, guru sering dianggap sebagai obyek pembinaan saja. Sebenarnya potensi guru sebagai pelaku pembinaan di sekolah cukup besar dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Guru yang sudah ditatar dapat membina teman guru lain dalam forum rapat guru dengan semangat saling asih, saling asah dan saling asuh.

Dalam rangka pembinaan Profesional guru sekolah kejuruan tersebut, maka harus ada wadah dalam kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS).

Kegiatan-kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah menengah umum (SMP/SMA) mulai tahun 1979 dengan meningkatkan pengajaran IPA dan Matematika. Pada tahun 1980 di mulailah ada peraturan yang disebut pemantapan kerja guru atau disingkat PKG dengan sasaran 4000 guru IPA dan 2000 guru Matematika dari tingkat SMP dan SMA di 13 Propinsi (Panduan PKG SMP / SMA, 198). Program PKG ini berkembang sampai tindak lanjutnya, yaitu program untuk meneruskan metode dan bahan-bahan PKG kepada guru- guru yang tidak masuk program. Dalam tahun 1982 dimulailah penataran bagi guru sebagai tindak lanjut PKG yang disebut Sangkar PKG. Sementara itu diteruskan pula perluasan program PKG sampai 26 Propinsi dengan bantuan tambahan dari UNDP / Unesco.

Sementara ini Sekolah menengah kejuruan belum meperlihatkan aktivitasnya dalam meningkatkan profesionalnya melalui kegiatan seperti yang dilaksanakan oleh SMTA umum. Oleh karena kegiatan- kegiatan semacam ini banyak bermanfaat dalam meningkatkan kwalitas dan profesional guru, maka kegiatan semacam ini sangat perlu dicontoh dan dilaksanakan oleh para guru sekolah kejuruan.

Selain PKG, kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kwalitas kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan profesional guru adalah dilaksanakannya musyawarah guru bidang studi (MGBS). Kegiatan

ini akan lebih bermanfaat jika dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru yang kemudian dilanjutkan setiap satu sampai dua bulan sekali. Adapun tempat kegiatan dapat ditentukan berdasarkan musyawarah atau bergiliran dari sekolah yang satu ke sekolah lainnya secara bergantian.

Musyawarah guru bidang studi ini dapat dilaksanakan pada tingkat Kabupaten / Kotamadya maupun ditingkat propinsi. Untuk mempercepat perluasan informasi, maka langkah awalnya adalah ditingkat Propinsi mengambil wakil-wakil guru bidang studi tingkat Kabupaten / Kodya dan setelah itu dikembangkan ditingkat bawahnya yaitu tingkat kabupaten / kodya.

Masalah-masalah yang dapat dibahas dan dipecahkan dalam Musyawarah Guru Bidang Studi ini adalah mengenai :

1. Kurikulum, tujuan yang diharapkan agar guru dapat lebih memahami isi kurikulum, terutama pada bidang studi yang dimusyawarahkan.
2. Program kerja, tujuan yang diharapkan agar adanya kesamaan program dalam satu semester atau dalam masa satu tahun ajaran.
3. Model satuan pelajaran (MSP), tujuan yang diharapkan agar apa yang dibahas dalam satu MSP pada pokok bahasan yang sama ada persamaan antara guru bidang studi pada sekolah (X) dengan guru bidang studi pada sekolah (Y).
4. Penggunaan metode, media dan alat bantu lain yang dapat menunjang kegiatan proses belajar mengajar.
5. Diskusi dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang ditemui oleh guru selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
6. Mengumpulkan data dan mengembangkan bahan-bahan teknik dan praktek yang berguna untuk meningkatkan mutu kejuruan.

Selain beberapa masalah yang dapat dipecahkan bersama dalam MGBS, kegiatan ini juga dapat memberikan pengalaman baru yang merangsang minat guru untuk dapat mengembangkan cara-cara baru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal semacam ini akan menumbuhkan minat belajar bagi para siswa, sehingga akan meningkatkan gairah belajarnya.

Bagi guru kemandirian dalam melaksanakan profesionalisasinya setelah melalui beberapa tahap latihan dan pembinaan adalah merupakan tugas untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Kemandirian seorang guru (Sumardi, 1991) dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mengatur waktu, merencanakan dan menciptakan suasana belajar mengajar yang baik, mendorong interaksi dan kerja sama, memantau hasil

belajar siswa serta dapat memberikan remidiasi dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah mampu memberikan dorongan pada pembentukan kelompok kerja guru dalam rangka memajukan kerja sama dalam pengembangan dan implementasi pengetahuan dan ketrampilan proses guna meningkatkan kwalitas pendidikan kejuruan.

Kesimpulan.

Dari uraian di atas dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan kemampuan guru merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari semua usaha pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan.
2. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang keahlian tertentu dan diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu pula. Oleh karena pendidikan kejuruan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, khususnya dalam mempersiapkan tenaga terampil tingkat menengah, maka pendidikan kejuruan harus mendapatkan perhatian semua pihak.
3. Pembinaan guru bermaksud untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam kegiatan / proses belajar mengajar sehingga mampu menghasilkan lulusan sekolah kejuruan yang siap pakai dalam dunia usaha.
4. Pembinaan profesional guru dapat dilakukan oleh guru dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Salah satu wadah pembinaan guru yang dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan profesional adalah dengan melalui Penataran Pemantapan Kerja Guru (PKG) dan musyawarah guru bidang studi (MGBS).
5. Dalam rangka meningkatkan kwalitas pendidikan menengah kejuruan selain melalui pembinaan guru dapat dilakukan dengan jalur pendidikan lain, yaitu : penataran / kursus bidang studi keahlian atau jalur sekolah yang lebih tinggi / tugas belajar. Dan juga dapat dilakukan dengan mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan- kegiatan seminar yang berkaitan dengan pembinaan profesional dan pengembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ad. Rooijakkers, 1989, *Mengajar dengan sukses.* Jakarta : Gramedia.

Depdikbud, 1985, *Petunjuk pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah kejuruan IV*, Jakarta : Depdikbud.

Depdikbud, 1987, *Buku pedoman PKG SMP/SMA,* Surabaya : Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur.

J.J. Hasibuan, Drs, Dip. ED, 1988, *Proses belajar mengajar,* Bandung : Remaja Karya.

Meodjiarto, Dr, Ir, Msc, 1991. *Kemitraan antara lembaga pendidikan teknik dengan industri (makalah Seminar).* Malang : FPTK IKIP Malang.

Sutopo Nitiadmijoyo, SH, 1989, *Peran FPTK IKIP dalam hubungannya dengan pendidikan menengah kejuruan di Jatim (makalah seminar),* Malang *: FPTK IKIP Malang.*

Soenardi Djiwandono, Prof. Dr, 1991. *Konsep keman dirian akademik dan profesional lulusan LPTK,* Malang : warta IKIP Malang Tahun IX-30 Nopember 1991.

Tjipto Utomo dan Kees Ruijter, 1985. *Peningkatan dan pengembangan pendidikan*, Jakarta : Gramedia.

Undang - undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1980, *Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta : Dharma Bakti.